

SKRIPSI
ANALISIS STRUKTUR EKONOMI
KABUPATEN LUWU TAHUN 2000-2004



UNIVERSITAS HASANUDDIN	
Tgl. Pengantar	6-12-2006
Nama Dosen	Fale. Elwanu?
Nama Mahasiswa	115001/04
Standa	H
No. Inventaris	134/6-12-06
No. Kias	

OLEH :
SITTI MARWA
A11102070

JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2006

**ANALISIS STRUKTUR EKONOMI
KABUPATEN LUWU TAHUN 2000-2004**



Oleh :

SITTI MARWA

A 111 02 070

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi pada
Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin
Makassar

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Handwritten signature of Dr. Paulus Uppun, MA.

DR. PAULUS UPPUN, MA

Pembimbing II

Handwritten signature of Drs. Anas Iswanto Anwar, MA.

DRS. ANAS ISWANTO ANWAR, MA

Kata Pengantar



Segala Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunian-Nya. Karena dengan Rahmat dan Karunian-Nya inilah yang menjadikan skripsi yang berjudul "Analisis Struktur Ekonomi Kabupaten Luwu Tahun 2000-2004" ini dapat terselesaikan.

Penyusunan skripsi ini juga tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa bantuan dari banyak pihak yakni:

- Bapak DR. Paulus Uppun, MA selaku Penasehat Akademik dan sekaligus sebagai Pembimbing I, yang telah memberikan arahan, bimbingan dan kritikan serta waktu selama penulis menjadi mahasiswa di fakultas ini dan selama penyusunan skripsi ini.*
- Bapak Drs. Anas Iswanto Anwar, MA selaku Pembimbing II, atas segala arahan dan kebijakan-kebijakannya yang menjadikan skripsi ini terselesaikan.*
- Bapak Drs. Tadjuddin Parenta, MA selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin.*
- Segenab dosen yang telah membekali ilmu pengetahuan sehingga memungkinkan penulis dapat menyusun suatu skripsi.*

- *Seluruh Staf Akademik Fakultas Ekonomi UNHAS yang telah memberikan pelayanan maksimal sejak penulis memasuki fakultas ini.*
 - *Seluruh Pimpinan dan Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Luwu yang telah memberikan izin dan bantuan untuk mengadakan penelitian, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.*
 - *Yang tercinta Ayahanda H.M. Yahya Yusuf dan Ibunda Hj. Dewi Yahya, hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala dukungan dan limpahan doa darimu.*
 - *Buat Saudariku Hj.St. Mardiyah Yahya dan St. Maryam Yahya dan yang tercakup dirumah Ahmad Dzaky AL Gifari.*
 - *Buat Muh. Suhendra.... That's person who make my life is more wonderfull.*
 - *Buat K' Abd.Rahman Farizi atas segala bantuannya selama penyusunan skripsi ini, dan buat kakak-kakak IE '01.*
 - *Best friendku.. Ullly Maemunah... Semangat!!! , Fatimah Nur+ Jamaluddin Jr., Sang Calon Pengantin Uswatul Hasanah, Yang juga segera nyusul Nasriani Nakir....*
- Thanks a lot guyz for all of experience 'bout Life, Love, and friendship.*

- *Buat semua di Spies Patrie '02.....*

Kepala sukunya A.Zulkarnain, Fata yg keukeh berjuang, bang Yos, Bang Don-nya Ani, frenku IccanK, Githo_chanos", gank cool IE '02 versi IE'02 ji jg ada omo, bibie, bandy, ishak, acil_thank\$ pulsanya, mamat, binyo, Tiar, Eeedo., callu+herman sang fotografer kita, jamal si wartawan sibuk, iqbal, rijaL, ojie, Laode, runGGAng, Anis, unga, Juve, Opik+aksar+dedi, Jamroni,

Cewek" yang cantik", imut", yang manis" semua ada di Spies Patrie '02.....yang sudah SE, ada Rehana, Ita Sweet, Ratu,.. Syarifah "Yayank" Dini, Unhi, Vera, Aya', Shinta, Ida Esong , Miar, Ky_Gond, TriO "mini" Wiryah+Fika+Tika, Lina_Si cewek tangguh, Bunga, DiLLa, Puput_cute, Hj.Riri, Astri, Mila, Ky_Bond, Salmah_man!! Cindy, Septy, Serly, Herlin, Rini, Golden, UdeL, Idawati, Agry_tse, Litha.... Buat yang 'gak ada disini sorry cezz 'gak sengaja lupa.

Makassar, Desember 2006

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	vi
BAB I Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II Tinjauan Pustaka.....	6
2.1. Pembangunan Ekonomi.....	6
2.2. Teori Pertumbuhan Ekonomi.....	7
2.2.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik.....	8
2.2.2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Harrod-Domar.....	9
2.2.3. Teori Pertumbuhan Schumpeter.....	9
2.3. Faktor-faktor Pertumbuhan Ekonomi.....	10
2.3.1. Faktor Ekonomi.....	10
2.3.2. Faktor Non Ekonomi.....	12
2.4. Komponen Sektor dalam Struktur Ekonomi.....	14
2.5. Teori Basis Ekonomi.....	16
2.6. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	24
2.7. Hipotesis.....	28

BAB III Metodologi Penelitian.....	29
3.1. Kerangka Konseptual.....	29
3.2. Jenis dan Sumber Data.....	30
3.3. Model Analisis.....	31
3.4. Defenisi Operasional.....	33
3.5. Sistematika Penulisan.....	35
BAB IV Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
4.1. Penduduk dan Ketenagakerjaan.....	40
4.2. Pertumbuhan Ekonomi.....	43
4.3. Pertumbuhan Riil Setiap Sektor.....	44
4.4. PDRB Perkapita.....	45
4.5. Tinjauan PDRB Sulawesi Selatan.....	48
BAB V Hasil dan Pembahasan.....	52
5.1. Struktur Ekonomi.....	52
5.2. Analisa Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan.....	56
5.3. Pengeluaran Sektor Basis dalam APBD.....	58
BAB VI Kesimpulan dan Saran.....	61
6.1. Kesimpulan	61
6.2. Saran.....	62
Daftar Pustaka.....	64

BAB I

PENDAHULUAN



1.1.Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan proses kenaikan pendapatan per kapita daerah tersebut dalam jangka panjang. Dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi maka upaya-upaya untuk merubah struktur ekonomi dari dominasi sektor primer ke arah peningkatan peran dan kontribusi sektor sekunder dan tersier menjadi sangat penting. Sejalan dengan itu untuk tumbuh dan berkembangnya suatu daerah tergantung pada dinamika interaksi diantara kegiatan yang saling tarik menarik dan saling bersaing, baik didalam wilayah tersebut maupun kegiatan pada wilayah lain disekitarnya. Suatu wilayah mempunyai problematika yang khas dan cukup kompleks, perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan potensi ekonomi, social budaya, dan demografi.

Untuk mengelola dan memanfaatkan kekayaan dan potensi yang dimiliki tersebut, maka perhatian utama ditujukan untuk melihat komposisi ekonomi yakni dengan mengetahui sumbangan atau peranan pada masing-masing kegiatan ekonomi atau sektor dalam

perekonomiannya. Disamping itu, proses perubahan komposisi ekonomi tersebut tidak dapat dipisahkan dengan pertumbuhan ekonomi, yakni dengan penekanan pada kenaikan output per kapita dalam jangka panjang melalui peningkatan PDRB per tahun, yang berlangsung secara dinamis.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah, tentunya hal ini merupakan perubahan kebijakan yang dapat memberikan peluang bagi daerah untuk dapat menggali dan mengembangkan potensi ekonomi secara mandiri. Pertumbuhan ekonomi daerah pada dasarnya dipengaruhi oleh keunggulan kompetitif suatu daerah, spesialisasi wilayah serta potensi ekonomi yang dimiliki daerah tersebut. Adanya potensi ekonomi di suatu daerah tidaklah mempunyai arti bagi pembangunan ekonomi daerah tersebut bila tidak ada upaya memanfaatkan dan mengembangkan potensi ekonomi yang potensial harus menjadi prioritas utama untuk digali dan dikembangkan dalam rangka melaksanakan pengembangan ekonomi daerah secara utuh.

Kabupaten Luwu dalam tempo tidak lebih dari tiga tahun telah dimekarkan menjadi 3 daerah strategis, yaitu Luwu, Luwu Utara yang

kemudian dimekarkan lagi menjadi Luwu Timur dan Kota Palopo. Luas wilayah Kabupaten Luwu 3.098,97 Km² (sebelum Palopo menjadi kota otonom) dengan jarak tempuh dari Kota Makassar sepanjang 367 Km.

Sampai dengan tahun 2002 Struktur Kabupaten Luwu didominasi oleh sektor pertanian dalam arti luas dengan kontribusi pendapatan perkapita 41,58 % dari Total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), kontribusi sektor pertambangan 24,43 %, sektor perdagangan 8,67 %, sektor jasa 7,62 % dan sektor industri pengolahan sekitar 5,70 persen. Sebagai kawasan andalan Luwu yang telah dimekarkan menjadi Luwu Utara, Luwu Timur, Kota Palopo dan Luwu itu memiliki sektor pertambangan, sentra pengembangan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, kelautan dan pariwisata. Potensi inilah yang menjadi daya pikat investor dalam melakukan investasi di Kabupaten Luwu. Terbukti Luwu pernah tercatat menempati urutan ke 11 sebagai salah satu wilayah berpotensi di Indonesia yang mendapat lirikan investor dari dalam dan luar negeri.

Berdasarkan uraian di atas, maka skripsi ini diberi judul : **"Analisis Struktur Ekonomi Kabupaten Luwu Periode Tahun 2000-2004."**

1.2.Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang maka masalah pokok yang dikemukakan yakni :

1. Sektor apakah yang paling dominan dalam struktur ekonomi di Kabupaten Luwu di tahun 2000 hingga tahun 2004.
2. Apakah pengeluaran Pemerintah Kabupaten Luwu selama ini dikonsentrasikan pada pembiayaan sektor basis.

1.3.Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1.Tujuan Penelitian

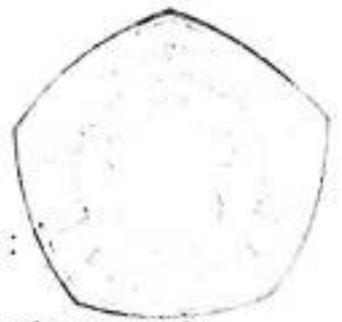
Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui sektor yang paling dominan dalam struktur ekonomi di Kabupaten Luwu.
2. Mengetahui sejauh mana pengeluaran Pemerintah Kabupaten Luwu dikonsentrasikan pada pembiayaan sektor basis.

1.3.2.Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk penyusunan anggaran daerah pada periode - periode mendatang agar lebih terfokus dan sesuai dengan potensi daerah atau sektor basis sehingga fungsi anggaran benar-benar dapat dijalankan sebagai stimulan pembangunan
2. Diharapkan dapat berguna bagi peneliti lain yang berminat melakukan penelitian serupa atau mengembangkan penelitian ini lebih lanjut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1..Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan.

Dari definisi di atas jelas bahwa pembangunan ekonomi mempunyai pengertian:

1. Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus menerus.
2. Usaha untuk menaikkan pendapatan per kapita, dan
3. Kenaikan pendapatan per kapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang.
4. Perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya). Sistem kelembagaan ini bisa ditinjau dari 2 aspek yaitu : perbaikan di bidang organisasi (institusi) dan perbaikan di bidang regulasi (baik legal formal maupun informal).

Jadi pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai suatu proses agar saling keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-

faktor yang menghasilkan pembangunan ekonomi tersebut dapat dilihat dan dianalisis. Dengan cara tersebut bisa diketahui deretan peristiwa yang timbul dan akan mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi dan taraf kesejahteraan masyarakat dari satu tahap pembangunan ke tahap pembangunan berikutnya.

Selanjutnya Arsyad (1999:298) mengemukakan bahwa pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang dengan upaya pemerintah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

2.2. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi bisa didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana factor-faktor tersebut saling berinteraksi satu sama lain, sehingga terjadi proses pertumbuhan. Di dalam ilmu ekonomi terdapat banyak teori tentang pertumbuhan ekonomi namun tidaklah terdapat suatu teori yang bersifat menyeluruh serta lengkap dan baku. Hal ini disebabkan adanya perbedaan pendapat dan persepsi dari masing-masing ahli ekonomi.

2.2.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik ada empat factor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu jumlah penduduk, jumlah stock barang, modal, luas tanah dan kekayaan alam serta tingkat teknologi yang dicapai. Walaupun banyak faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi, namun ahli klasik lebih banyak menyoroti pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam teori pertumbuhan mereka menyatakan bahwa luas tanah dan kekayaan tetap jumlahnya dan tingkat teknologi tidak mengalami perubahan. Selanjutnya berdasarkan asumsi di atas, mereka menganalisa bagaimana pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap tingkat produksi dan pendapatan.

Menurut Ricardo, pola proses pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut; pada mulanya jumlah penduduk rendah dan kekayaan alam relative banyak, akibatnya pengusaha memperoleh banyak keuntungan yang tinggi, maka laba yang tinggi akan menciptakan tingkat pembentukan modal yang tinggi pula, ini akan menyebabkan kenaikan produksi dan penambahan permintaan tenaga kerja, karena jumlah tenaga kerja yang terpakai bertambah, maka upah akan naik, kenaikan ini akan mendorong pertumbuhan penduduk.

Ahli ekonomi klasik lainnya adalah John Stuart Mill, yang banyak mengalihkan perhatiannya pada masalah ekonomi. Dalam berbagai hal Stuart Mill tidaklah jauh berbeda dengan para ahli ekonomi klasik lainnya. Mill menganggap pertumbuhan ekonomi sebagai fungsi dari tanah, tenaga kerja dan modal. Menurut Mill peningkatan kesejahteraan hanya terjadi bila tanah dan modal mampu meningkatkan produksi lebih cepat dibanding penambahan angkatan kerja.

2.2.2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Harrod-Domar

Teori pertumbuhan yang dibangun oleh Harrod-Domar didasarkan pada Negara maju. Kedua ahli ekonomi ini pada hakekatnya berusaha untuk menunjukkan syarat yang diperlukan untuk pertumbuhan yang mantap. Analisa Harrod – Domar dikembangkan oleh Teori Keynes, pengeluaran investasi (I) mempengaruhi permintaan agregat (Z) tetapi tidak mempengaruhi penawaran agregat (S). Menurut Kedua ekonom ini pengeluaran investasi (I) tidak mempunyai pengaruh (lewat proses multiplier) terhadap permintaan agregat (Z), tetapi juga penawaran agregat (S) melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi.

2.2.3. Teori Pertumbuhan Schumpeter

Teori Pertumbuhan Schumpeter dilandasi oleh pemikiran tentang pentingnya peranan pengusaha dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Dalam pemikiran ini dinyatakan bahwa para pengusaha

merupakan golongan yang akan membuat suatu pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Gambaran umum Schumpeter dari proses kemajuan ekonomi yang diartikan sebagai peningkatan output total masyarakat atau *Gross Domestic Product* (GDP). Namun menurutnya, kenaikan output yang paling menarik adalah bersumber oleh inovasi yang dilakukan para pengusaha.

Pertumbuhan ekonomi timbul karena faktor-faktor yang bersifat rutin yaitu pertumbuhan penduduk dan akumulasi kapital yang berasal dari tabungan masyarakat (tidak bersumber dari keuntungan para monopolistis)

2.3.Faktor-faktor Pertumbuhan Ekonomi

Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor yaitu :

2.3.1.Faktor Ekonomi

Para ahli ekonomi menganggap faktor produksi sebagai kekuatan utama yang mempengaruhi pertumbuhan.Laju pertumbuhan ekonomi jatuh atau banggunya merupakan konsekuensi dari perubahan yang terjadi didalam faktor produksi tersebut. Beberapa faktor ekonomi tersebut antara lain :

1. Sumber Alam

Di negara sedang berkembang sumber alam sering kali terbengkalai, kurang atau salah pemanfaatan. Inilah salah satu penyebab keterbelakangan itu. Tersedianya sumber alam secara melimpah saja belumlah cukup bagi pertumbuhan ekonomi, akan tetapi diperlukan pemanfaatannya secara tepat. Jika sumber alam tersebut tidak dipergunakan secara tepat, negara itu tidak mungkin mengalami kemajuan.

Jadi dalam pertumbuhan ekonomi, kekayaan alam yang melimpah saja tidaklah cukup tapi yang terpenting adalah pemanfaatannya secara tepat dengan teknologi yang baik sehingga efisien dan sumber daya alam tersebut dapat dipergunakan dalam jangka waktu yang lebih lama.

2. Akumulasi Modal

Modal berarti persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat diproduksi apabila stock modal naik dalam batas waktu tertentu. Dalam ungkapan Prof. Nurkse "Makna pembentukan modal adalah masyarakat tidak melakukan seluruh kegiatannya saat ini sekedar untuk memenuhi kebutuhan keinginan konsumsi yang mendesak tetapi mengarahkan sebagian daripadanya untuk pembuatan barang modal.

3. Organisasi

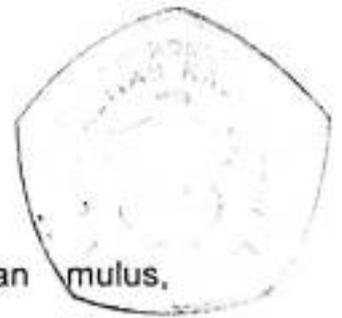
Organisasi merupakan bagian penting dari proses pertumbuhan ekonomi. Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi didalam kegiatan ekonomi. Organisasi bersifat melengkapi modal, buruh dan membantu meningkatkan produktivitas.

4. Kemajuan teknologi

Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor terpenting didalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan itu berkaitan dengan perubahan didalam metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau hasil dari teknik penelitian baru perubahan pada teknologi telah menaikkan produktivitas buruh, modal dan faktor produksi lain.

2.3.2. Faktor Non Ekonomi

Faktor non ekonomi berguna terhadap faktor ekonomi saling mempengaruhi kemajuan perekonomian. Dalam kenyataan, faktor non ekonomi pada umumnya seperti organisasi sosial, budaya dan politik mempengaruhi faktor ekonomi. Oleh karena itu faktor non ekonomi juga memiliki arti penting di dalam proses pertumbuhan ekonomi. Faktor non ekonomi tersebut antara lain :



1. Faktor Sosial

Kalau pembangunan ekonomi diinginkan berjalan mulus, pandangan nilai-nilai dan lembaga-lembaga sosial harus diubah. Perubahannya hanya mungkin terjadi melalui penyebaran pendidikan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi bila tatanan sosial dipengaruhi oleh sistem yang ketat dan sistem famili, kebebasan individu dan mobilitas profesi akan sangat rendah. Sebagai akibatnya orang terdorong untuk bekerja lebih keras, mendapat lebih banyak dan menabung lebih banyak.

2. Faktor Manusia

Persyaratan paling penting bagi laju pertumbuhan industri adalah manusia. Manusia di atas segalanya yang berdedikasi terhadap pembangunan ekonomi negaranya dan terhadap kejujuran, kewibawaan, pengetahuan dan prestasi kerja.

3. Faktor Politik dan Administratif

Faktor politik dan administratif juga membantu pertumbuhan ekonomi modern, Prof.Lewis dengan tepat melihat tindakan pemerintah memainkan peran penting dalam merangsang atau mendorong kegiatan ekonomi. Keterlibatan stabilitas dan perlindungan hukum mendorong kewiraswastaan, semakin besar kebebasan itu semakin berhasil pula kewiraswastaan itu.

Kemajuan teknologi, mobilitas faktor dan pasar yang luas membantu merangsang usaha dan inisiatif.

2.4. Komponen Sektor dalam Struktur Ekonomi

Menurut Azis (1994:229-230), pengamatan tentang proses pembangunan daerah dengan pendekatan sektoral dan regional tidak dapat dilepaskan dari sistem ekonomi politik negara yang bersangkutan. Pendekatan sektoral dalam perencanaan selalu di mulai dengan tujuan tentang sektor yang perlu dikembangkan untuk mencapai salah satu tujuan pembangunan nasional, jumlah produk yang dihasilkan, teknologi dan waktu kapan produksi dimulai. Dalam pendekatan regional, tujuan dititikberatkan pada daerah mana yang perlu mendapat prioritas dan perlu dikembangkan sesuai dengan potensi daerah yang bersangkutan dan sektor apa saja yang sesuai untuk dikembangkan di tiap-tiap daerah.

Menurut Kunarjo, (1996:55), sektor adalah kumpulan dari kegiatan-kegiatan atau program yang mempunyai persamaan ciri-ciri serta tujuannya. Pembagian menurut klasifikasi fungsional seperti sektor, maksudnya untuk mempermudah perhitungan-perhitungan dalam mencapai sasaran makro. Sektor-sektor ini selain mempunyai ciri-ciri yang berbeda satu sama lain, juga mempunyai daya dorong yang berbeda satu sama lain, juga mempunyai

daya dorong yang berbeda dalam mengantisipasi investasi yang dilakukan pada masing-masing sektor.

Menurut Partadireja (1996:45), bahwa segmentasi dikemukakan oleh PBB dan Negara lain, semua kegiatan produksi dan jasa dikelompokkan ke dalam 11 (sebelas) kelompok yang masing-masing dinamakan lapangan usaha (industri origin). Hal ini berlaku di Indonesia baik tingkat Nasional maupun regional yang dikelompokkan kedalam 9 (sembilan) atau 11 (sebelas) sektor. Kalau diikuti pembagian sektor ekonomi sesuai dengan yang dianut oleh perhitungan pendapatan regional maupun nasional, maka perekonomian dilihat dari kegiatannya dapat dibagi menjadi 11 (sebelas) sektor (menurut harga konstan 1983), sebagai berikut: (1) pertanian, meliputi pertanian bahan makanan, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan; (2) pertambangan dan penggalian ; (3) industri pengolahan; (4) listrik dan air bersih; (5) bangunan; (6) perdagangan, hotel dan restoran; (7) angkutan dan komunikasi; (8) keuangan; (9) persewaan dan jasa perusahaan; (10) pemerintahan, ; dan (11) jasa-jasa.

Sedangkan menurut harga konstan 1993, sektor ekonomi dibagi menjadi 9 (sembilan) sektor , yaitu : (1) sektor pertanian; (2) sektor pertambangan dan penggalian; (3) sektor Industri dan pengolahan; (4) sektor listrik dan air bersih; (5) sektor bangunan dan konstruksi; (6) sektor

perdagangan, hotel dan restoran; (7) sektor angkutan dan komunikasi; (8) sektor keuangan dan perusahaan; (9) sektor jasa-jasa.

Pembangunan semua sektor ditempuh berdasarkan rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, yang tujuan fungsional menyajikan prioritas pembangunan, mengidentifikasi sasaran pada masing-masing sektor, pengalokasian dana sesuai dengan penekanan pada sektor tertentu, penentuan biaya, serta menentukan tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan.

Dengan demikian diharapkan terciptanya perekonomian daerah yang kokoh dan mandiri sebagai usaha bersama sesuai dengan asas kekeluargaan, memperkuat struktur ekonomi daerah yang seimbang antara sektor sehingga mampu tumbuh atas kekuatan sendiri, dengan ciri industri yang kuat dan maju serta pertanian yang tangguh, menciptakan nilai tambah (*value added*) yang sebenar-benarnya bagi masyarakat, suatu pola perdagangan yang mantap sehingga mampu menjamin kestabilan perekonomian daerah, berkembangnya kegiatan dunia usaha, kemitraan dalam bidang ekonomi serta semangat kewirausahaan, dan terjaminnya pengelolaan sumberdaya alam berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian

2.5. Teori Basis Ekonomi

Teori basis ekonomi menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung

dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga dan bahan baku untuk ekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan menciptakan peluang kerja (Arsyad, 1999:116). Teori Basis Ekonomi sering disebut Analisis Basis yang digunakan untuk mengidentifikasi pendapatan basis. Richardson mengembangkan suatu model ekonomi regional yaitu Basis Ekonomi. Model ini dapat menjelaskan struktur perekonomian suatu daerah. Dalam model ini kegiatan ekonomi suatu daerah dapat dibedakan menjadi dua sektor yaitu basis dan non basis. Sektor basis yaitu sektor yang mampu melayani pasar di dalam dan diluar daerah . Sedangkan sektor non basis hanya mampu melayani pasar di dalam daerah itu sendiri. Teori basis ini disebut Analisis Basis dapat digunakan untuk mengidentifikasikan pendapatan basis. Berkembangnya pendapatan di sektor basis akibat mampu secara luas menjual produknya baik di dalam dan ke luar daerah akan meningkatkan pendapatan regional secara langsung yang dibarengi dengan peningkatan kesempatan kerja. Karena terjadinya arus pendapatan dari luar daerah mendorong permintaan pada sektor non basis yang menyebabkan kenaikan konsumsi dan investasi di daerah

Setiap pertumbuhan sektor basis dan non basis memiliki efek ganda terhadap perekonomian wilayah. Bertambahnya aktivitas pada sektor basis

akan menimbulkan pertambahan pendapatan arus ke dalam, sehingga permintaan barang dan jasa hasil basis dan non basis akan meningkat. Untuk keperluan menentukan sektor basis digunakan metode LQ. Untuk mengukur tingkat konsentrasi dari suatu kegiatan industri dengan cara membandingkan peran suatu industri di suatu daerah dengan industri sejenis dengan skope yang lebih luas (nasional).

Untuk mengetahui apakah suatu sektor merupakan sektor basis atau non basis digunakan model *Location Quotient* (LQ). Model tersebut menentukan sektor-sektor ke dalam kategori ekspor (seperti manufaktur dan pertanian) atau ke dalam kelompok lokal bukan basis (distribusi, pemerintah lokal, perbankan dan keuangan, hiburan dan sebagainya). Kadang-kadang metode ini disempurnakan sedikit, dengan jalan mengakui adanya sekelompok sektor-sektor campuran (kelompok mana yang mungkin besar) dan kemudian menaksir komponen basisnya dengan cara lain.

Teknik LQ atau yang paling lazim digunakan dalam studi-studi empirik LQ diterapkan kepada masing-masing industri individual di daerah yang bersangkutan (dan bangsa sebagai keseluruhan sebagai norma referensi), dan quotient yang lebih besar daripada satu dipergunakan sebagai petunjuk adanya kegiatan eksport. Asumsinya adalah bahwa jika suatu daerah lebih berspesialisasi daripada bangsa

akan menimbulkan pertambahan pendapatan arus ke dalam, sehingga permintaan barang dan jasa hasil basis dan non basis akan meningkat. Untuk keperluan menentukan sektor basis digunakan metode LQ. Untuk mengukur tingkat konsentrasi dari suatu kegiatan industri dengan cara membandingkan peran suatu industri di suatu daerah dengan industri sejenis dengan skope yang lebih luas (nasional).

Untuk mengetahui apakah suatu sektor merupakan sektor basis atau non basis digunakan model *Location Quotient* (LQ). Model tersebut menentukan sektor-sektor ke dalam kategori ekspor (seperti manufaktur dan pertanian) atau ke dalam kelompok lokal bukan basis (distribusi, pemerintah lokal, perbankan dan keuangan, hiburan dan sebagainya). Kadang-kadang metode ini disempurnakan sedikit, dengan jalan mengakui adanya sekelompok sektor-sektor campuran (kelompok mana yang mungkin besar) dan kemudian menaksir komponen basisnya dengan cara lain.

Teknik LQ atau yang paling lazim digunakan dalam studi-studi empirik LQ diterapkan kepada masing-masing industri individual di daerah yang bersangkutan (dan bangsa sebagai keseluruhan sebagai norma referensi), dan quotient yang lebih besar daripada satu dipergunakan sebagai petunjuk adanya kegiatan ekspor. Asumsinya adalah bahwa jika suatu daerah lebih berspesialisasi daripada bangsa

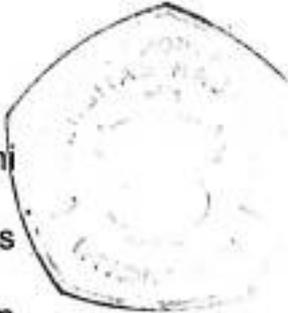
yang bersangkutan dalam produksi suatu barang tertentu, maka ia mengekspor barang itu sesuai dengan tingkat spesialisasinya. Dengan perkataan lain, kita berasumsi lokal dalam produksi mempunyai makna ekspor lokal dari surplus.

Sektor-sektor basis tidak hanya sektor-sektor ekspor (sektor surplus) saja, tetapi juga mencakup semua kegiatan yang tidak terkait pada tingkat kegiatan ekonomi di daerah bersangkutan. Jadi sektor-sektor basis meliputi semua aktivitas yang didukung secara ekstern terutama oleh pemerintah.

Menurut Richardson (1991:16) asumsi yang dipakai adalah spesialisasi lokal dalam produksi yang mempunyai makna ekspor dari produksi surplus, asumsi-asumsi lainnya adalah sebagai berikut :

1. Pola permintaan setiap daerah sama dengan pola permintaan secara nasional.
2. Produktifitas tiap pekerja sektor regional sama dengan produktifitas pekerja dalam industri nasional.
3. Perekonomian nasional merupakan perekonomian tertutup.

Dasar pemikiran dari penggunaan teknik analisis LQ adalah *Economic Basic Theory* yang intinya adalah : karena industri basis menghasilkan barang dan jasa baik untuk pasar daerah maupun pasar



luar daerah yang bersangkutan, maka penjualan dari luar daerah ini akan menghasilkan pendapatan bagi daerah tersebut. Terjadinya arus pendapatan dari luar daerah ini menyebabkan terjadinya kenaikan konsumsi dan investasi di daerah tersebut. Dan pada gilirannya akan menaikkan pendapatan daerah dan menciptakan kesempatan kerja baru (Arsyad, 1997:315). Peningkatan pendapatan tersebut tidak hanya menaikkan permintaan akan industri basis, tetapi juga menaikkan permintaan terhadap industri basis, juga menaikkan permintaan akan industri non - basis (lokal). Kenaikan permintaan ini akan mendorong kenaikan investasi pada industri yang bersangkutan sehingga investasi modal dalam sektor industri lokal merupakan investasi yang didorong (*induced*) sebagai akibat dari kenaikan industri basis.

Oleh karena itu, industri basislah yang patut dikembangkan di suatu daerah. Tugas pertama yang harus kita lakukan adalah menggolongkan setiap industri apakah termasuk industri basis atau non basis. Untuk keperluan ini dipakai *Location Quotient* (LQ), yaitu usaha untuk mengukur konsentrasi dari suatu kegiatan (industri) dalam suatu daerah dengan cara membandingkan peranannya dalam perekonomian daerah itu dengan peranan kegiatan atau industri sejenis dalam perekonomian regional atau nasional (Arsyad, 1999:316). Menurut Kadaria (1985:70) kenaikan pendapatan tidak hanya menaikkan permintaan

terhadap hasil industri basis, namun juga akan menaikkan permintaan hasil industri lokal bukan basis.

Untuk mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang potensial atau sektor basis yang dapat dikembangkan dengan tujuan meningkatkan pendapatan daerah. Pendapatan daerah di suatu daerah akan langsung meningkat kenaikannya bila sektor basis mengalami ekspansi. Untuk mengetahui sektor ekonomi termasuk dalam kategori basis dan bukan basis digunakan *Location Quotient* (LQ) dengan cara membandingkan setiap sektor perekonomian Kabupaten Luwu dengan peranan kegiatan sektor perekonomian Propinsi Sulawesi Selatan, sehingga dapat diketahui sektor-sektor yang menjadi sektor basis atau sektor yang potensial di daerah. Secara matematis LQ dirumuskan sebagai berikut :

$$LQ_i = \frac{Y_{ik} / \sum Y_{ik}}{Y_{ip} / \sum Y_{ip}}$$

Dimana :

LQ_i = LQ sektor i pada tingkat kabupaten

Y_{ik} = PDRB sektor i pada tingkat kabupaten

$\sum Y_{ik}$ = Total PDRB pada tingkat kabupaten

Y_{ip} = PDRB sektor i pada tingkat propinsi

$\sum Y_{ip}$ = Total PDRB pada tingkat propinsi

Setelah LQ dihitung, maka akan diperoleh kesimpulan bahwa bila nilai LQ suatu sektor > 1 , maka sektor yang bersangkutan lebih terspesialisasi pada sektor yang sama ditingkat regional, sehingga sektor tersebut merupakan sektor yang potensial bagi daerah. Bila nilai LQ suatu sektor < 1 , maka sektor yang bersangkutan kurang terspesialisasi daripada sektor yang sama di tingkat regional, sehingga sektor yang bersangkutan bukan merupakan sektor basis atau sektor yang tidak potensial bagi daerah. Bila nilai LQ = 1, maka sektor yang bersangkutan sama tingkat spesialisasi dengan tingkat regional.

Atau dengan kata lain, hasil perhitungan LQ dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi mana sektor basis. Semakin tinggi nilai LQ semakin tinggi keunggulan komparatif bagi daerah untuk mengembangkan sektor basis. Ketentuannya bila LQ lebih besar dari 1 menunjukkan sektor tersebut prospektif dikembangkan.

Dalam prakteknya penggunaan pendekatan LQ meluas, teknis tidak terbatas pada bahasan ekonomi saja akan tetapi juga dimanfaatkan untuk menentukan sebaran komoditas atau melakukan identifikasi wilayah berdasarkan pemahaman tentang teori ekonomi basis, teknik LQ relevan digunakan sebagai metode dalam menentukan komoditas unggulan khususnya dari sisi penawaran (produksi dan

Setelah LQ dihitung, maka akan diperoleh kesimpulan bahwa bila nilai LQ suatu sektor > 1 , maka sektor yang bersangkutan lebih terspesialisasi pada sektor yang sama ditingkat regional, sehingga sektor tersebut merupakan sektor yang potensial bagi daerah. Bila nilai LQ suatu sektor < 1 , maka sektor yang bersangkutan kurang terspesialisasi daripada sektor yang sama di tingkat regional, sehingga sektor yang bersangkutan bukan merupakan sektor basis atau sektor yang tidak potensial bagi daerah. Bila nilai LQ = 1, maka sektor yang bersangkutan sama tingkat spesialisasi dengan tingkat regional.

Atau dengan kata lain, hasil perhitungan LQ dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi mana sektor basis. Semakin tinggi nilai LQ semakin tinggi keunggulan komparatif bagi daerah untuk mengembangkan sektor basis. Ketentuannya bila LQ lebih besar dari 1 menunjukkan sektor tersebut prospektif dikembangkan.

Dalam prakteknya penggunaan pendekatan LQ meluas, teknis tidak terbatas pada bahasan ekonomi saja akan tetapi juga dimanfaatkan untuk menentukan sebaran komoditas atau melakukan identifikasi wilayah berdasarkan pemahaman tentang teori ekonomi basis, teknik LQ relevan digunakan sebagai metode dalam menentukan komoditas unggulan khususnya dari sisi penawaran (produksi dan

populasi) untuk komoditas yang berbasis lahan seperti tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, perhitungannya didasarkan pada lahan pertanian (areal tanam atau areal panen) produksi dan produktivitas. Sedangkan untuk komoditas pertanian yang tidak berbasis lahan seperti usaha ternak, dasar perhitungannya digunakan jumlah produksi (ekor).

2.5.1.Kelebihan dan Keterbatasan Sektor Basis

Setiap metode analisis mempunyai kelemahan dan keterbatasan, demikian halnya dengan metode LQ. Kelebihan metode LQ dalam mengidentifikasi komoditas unggulan antara lain penerapannya sederhana, mudah dan tidak memerlukan program pengolahan yang rumit. Penyelesaian analisis cukup dengan *spread sheet* dan *excel* atau dengan program lotus, bahkan jika datanya tidak terlalu banyak bisa menggunakan kalkulator.

Keterbatasannya adalah karena demikian sederhananya pendekatan LQ ini, maka yang dituntut adalah akurasi data. Sebaik apapun hasil olahan LQ tidak akan banyak manfaatnya jika data yang digunakan tidak valid. Oleh karena itu sebelum menggunakan analisis ini maka validitas data sangat diperlukan.

Keterbatasan lainnya dalam defenisi wilayah kajian. Untuk menetapkan batasan wilayah yang dikaji dan ruang lingkup aktifitas, acuannya sering tidak jelas. Akibat hasil perhitungan LQ, terkadang

aneh, tidak sama dengan apa yang kita duga. Misalnya suatu wilayah propinsi yang diduga memiliki keunggulan di sektor non pangan yang muncul malah pangan dan sebaliknya.

Oleh karena itu data yang dijadikan sumber bahasan sebelum digunakan perlu klarifikasi terlebih dahulu dengan beberapa sumber data lainnya, sehingga mendapatkan gambaran tingkat konsistensi data yang mantap dan akurat.

2.6. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu cara untuk melihat kemajuan perekonomian suatu daerah adalah dengan mencermati nilai pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun di suatu wilayah tertentu tanpa membedakan kepemilikan faktor-faktor produksi tapi lebih menekankan kepada keberadaan faktor-faktor yang digunakan dalam proses produksi tersebut.

Dalam menghitung pendapatan regional hanya dipakai konsep domestik. Berarti seluruh nilai tambah ditimbulkan oleh berbagai sektor atau lapangan usaha yang melakukan kegiatan usahanya di suatu wilayah atau region (provinsi atau kabupaten) dimasukkan tanpa memperhatikan pemilikan atau faktor-faktor produksi. Dengan demikian PDRB, secara agregatif menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan balas jasa atau

pendapatan faktor-faktor produksi yang berpartisipasi dalam proses produksi tersebut.

Dalam penyajiannya, PDRB selalu dibedakan atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku. Adapun defenisi PDRB Atas Dasar Harga Konstan adalah nilai barang dan jasa (komoditi) atau pendapatan atau pengeluaran yang dinilai atas dasar harga tetap. PDRB Atas Dasar Harga Konstan ini digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi karena nilainya tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan harga. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku adalah nilai barang dan jasa (komoditi) atau pendapatan, atau pengeluaran yang dinilai sesuai harga yang berlaku ini digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Nilai dari PDRB ini dapat dihitung melalui tiga pendekatan yaitu :

1. Dari segi produksi

PRDB merupakan jumlah nilai tambah produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam suatu daerah atau wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun)

2. Dari segi pendapatan

PDRB adalah jumlah jasa yang diterima oleh factor-faktor produksi ikut serta dalam proses produksi disuatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

3. Dari segi pengeluaran

PDRB adalah jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh konsumsi rumah tangga lembaga pemerintah yang tidak mencari keuntungan, pengeluaran untuk investasi dan ekspor netto pada suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

Sedangkan dalam hitungan PDRB seluruh lapangan usaha dibagi menjadi sembilan sector yaitu :

1. Sektor Pertanian

Sektor pertanian dibagi atas berbagai sub sector yaitu tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan.

2. Sektor pertambangan dan Penggalian

Sektor pertambangan dan penggalian dibagi atas tiga sub sector yaitu minyak dan gas bumi, pertambangan tanpa migas dan penggalian.

3. Sektor Industri Pengolahan

Sektor industri pengolahan dibagi atas dua sub sector yaitu :

- a) Sektor migas terdiri dari penggilingan minyak dan gas alam cair.
- b) Industri tanpa migas terdiri dari industri besar/sedang dan industri kecil dan kerajinan rumah tangga.

4. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih

Sektor listrik, gas dan air bersih dibagi atas tiga sub sector yaitu listrik, gas dan air bersih.

5. Sektor Bangunan

6. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Sektor perdagangan, hotel dan restoran dibagi atas tiga sub sector yaitu perdagangan besar dan eceran, hotel dan restoran.

7. Sektor Angkutan dan Komunikasi

Sektor angkutan dan komunikasi dibagi atas dua sub sector yaitu :

a) Pengangkutan yang terdiri dari angkutan rel, angkutan jalan raya, angkutan laut, angkutan udara dan jasa penumpang angkutan.

b) Komunikasi

8. Sektor Keuangan

Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.

Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dibagi atas empat sub sector yaitu bank, Lembaga keuangan bukan bank, sewa bangunan dan jasa perusahaan.

9. Sektor Jasa-jasa

Sektor jasa-jasa dibagi atas dua sub sector yaitu :

- a) Pemerintahan umum
- b) Swasta terdiri dari social kemasyarakatan, hiburan dan rekreasi, perumahan dan rumah tangga.



2.7.Hipotesis

Berdasarkan masalah pokok yang telah dikemukakan, maka dibuat hipotesis sebagai berikut :

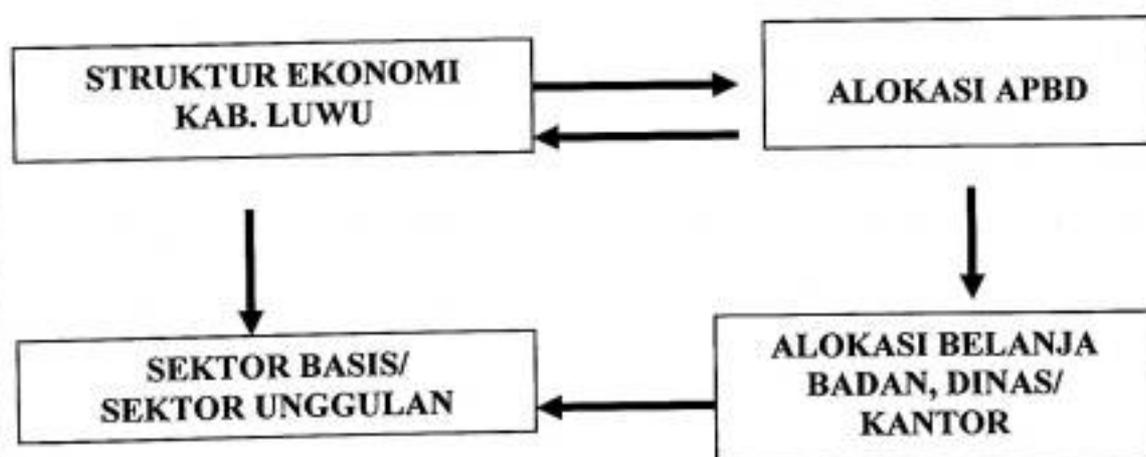
- Diduga sektor pertanian mendominasi Struktur Ekonomi Kabupaten Luwu dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2004.
- Diduga besarnya pengeluaran pemerintah Kabupaten Luwu searah dengan besarnya kontribusi sektor basis di Kabupaten Luwu.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Kerangka Konseptual

Untuk mencapai tujuan pembangunan daerah hendaknya prioritas pembangunan berlandaskan pada potensi daerah. Pembangunan ekonomi daerah diharapkan akan menyebabkan berkembangnya sistem perekonomian dikarenakan potensi daerah yakni sector-sector ekonomi tumbuh dan berkembang, serta mengalami perubahan struktur ekonomi yang mencakup adanya perubahan atau pergeseran secara perlahan-lahan sektor pertanian menuju peningkatan peran sektor industri yang pada gilirannya akan meningkatkan peranan sektor-sektor lainnya seperti sektor perdagangan jasa.



Sebagaimana yang diperlihatkan pada gambar di atas bahwa penelitian ini akan membahas struktur perekonomian Kabupaten Luwu. Selanjutnya akan mengidentifikasih sektor – sektor yang menjadi unggulan dengan mengetahui pertumbuhan dan struktur ekonomi. Untuk mengidentifikasinya diperlukan suatu metode analisis yang dapat membedakan sektor basis dan non basis. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis Location Quotient (LQ). Untuk selanjutnya dengan teridentifikasinya sektor unggulan ini akan dapat dikembangkan dengan pengalokasian anggaran untuk pembiayaan pada sektor unggulan ini melalui dinas-dinas ataupun badan pada pemerintahan daerah. Apabila sektor basis berkembang dengan baik, maka akan memiliki pengaruh yang signifikan dengan pertumbuhan ekonomi daerah.

3.2. Jenis dan sumber data

Dalam penulisan ini, jenis data yang digunakan adalah :

- a. Data kuantitatif, yakni data mengenai angka-angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Lapangan Usaha (sektor-sektor ekonomi) yang ada di Kabupaten Luwu, dan lainnya yang terkait dengan penulisan ini.

- b. Data kualitatif, yakni berbagai sumber referensi menyangkut teori-teori, defenisi-defenisi berbagai variable yang digunakan, laporan-laporan, dan informasi lainnya yang dibutuhkan dalam penulisan ini.

Sedangkan data yang digunakan dalam penulisan ini bersumber dari :

- a. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Luwu.
- c. Sumber lainnya yang terkait dengan penulisan ini.

3.3.Model Analisis

Untuk mengetahui struktur ekonomi Kabupaten Luwu yakni dengan melihat hasil perhitungan PDRB dan analisis *Location Quotient* (LQ) untuk menentukan sektor unggulan di Kabupaten Luwu. Selanjutnya untuk mengetahui berapa porsi pengeluaran pemerintah yang harus dialokasikan ke sektor basis tersebut digunakan analisa deskriptif.

3.3.1.Analisis Location Quotient (LQ)

Untuk menentukan sektor ekonomi unggulan digunakan alat analisis yaitu *Location Quotient* (LQ).

Analisis basis ekonomi yang biasanya disebut sebagai teori basis ekonomii digunakan untuk mengidentifikasi pendapatan dari sektor

andalan (Basis). Analisis Location Quotient (LQ) digunakan untuk melihat keunggulan komparatif suatu daerah dalam menentukan sektor andalan. LQ ini dapat menunjukkan kekuatan atau besar kecilnya peranan suatu sektor dalam suatu daerah dengan membandingkan sektor yang sama di daerah lainnya. Secara matematis Location dirumuskan sebagai berikut :

$$LQ_i = \frac{Y_{ik} / \sum Y_{ik}}{Y_{ip} / \sum Y_{ip}}$$

Dimana :

LQ_i = LQ sektor i pada tingkat kabupaten

Y_{ik} = PDRB sektor i pada tingkat kabupaten

$\sum Y_{ik}$ = Total PDRB pada tingkat kabupaten

Y_{ip} = PDRB sektor i pada tingkat propinsi

$\sum Y_{ip}$ = Total PDRB pada tingkat propinsi

Dengan menggunakan besaran PDRB, maka bilamana rasio diperoleh lebih besar dari satu dalam arti nilai LQ lebih besar dari satu berarti sektor tersebut termasuk unggul. Hal ini mengandung makna

bahwa sektor tersebut menguntungkan untuk dikembangkan lebih lanjut. Sebaliknya jika nilai LQ lebih kecil dari satu, maka itu berarti sektor tersebut kurang menguntungkan untuk dikembangkan. Jadi semakin besar nilai LQ dari suatu sektor semakin tinggi pula keunggulan *comparative* wilayah yang bersangkutan dalam mengembangkan sektor tersebut.

3.3.3. Analisa Deskriptif

Selanjutnya untuk mengetahui berapa porsi pengeluaran pemerintah yang harus dialokasikan ke sektor basis tersebut digunakan analisa deskriptif, yaitu membandingkan antara proporsi pengeluaran sektor-sektor ekonomi yang sudah dilakukan dengan proporsi dari hasil perhitungan berdasarkan Model LQ tersebut.

3.4. Defenisi Operasional

1. Pembangunan Ekonomi

Yang dimaksud pembangunan ekonomi disini adalah proses kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang dan jasa bagi kesejahteraan masyarakat.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi diartikan sebagai suatu peningkatan produksi barang dan jasa baik kapasitas produksi maupun volume wilayah produksi yang dihasilkan oleh daerah.

3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Yang dimaksud PDRB dalam penelitian ini adalah seluruh nilai netto barang dan jasa (komoditi) produksi pada suatu wilayah domestic tanpa memperhatikan pemilikan factor-faktor produksi.

4. Sektor Basis

Yang dimaksud Sektor Basis dalam penelitian ini adalah sektor ekonomi yang produksinya disamping dapat memenuhi kebutuhan lokal juga dapat mengekspor keluar wilayah bersangkutan

5. Sektor Non Basis

Yang dimaksud Sektor Non Basis adalah sektor ekonomi yang produksinya hanya mampu memenuhi kebutuhan lokal.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Yang dimaksud APBD adalah rencana operasional keuangan pemerintah daerah kabupaten yang menggambarkan perkiraan penerimaan dan perkiraan pengeluaran – pengeluaran pemerintah tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

7. Lapangan Usaha

Yang dimaksud Lapangan Usaha adalah kegiatan ekonomi yang biasa juga disebut sektor sebagaimana tertuang dalam PDRB.

3.5.Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, masalah pokok, tujuan dan kegunaan.

BAB II : Tinjauan Pustaka, membahas tentang Pembangunan Ekonomi, Teori Pertumbuhan Ekonomi, Komponen Sektor dalam Struktur Ekonomi, Teori Basis Ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dan Hipotesis.

BAB III : Metodologi Penelitian , menguraikan tentang Kerangka Konseptual, jenis dan sumber data, metode analisis, dan definisi operasional serta sistematika penulisan.

BAB IV : Gambaran umum, mengenai gambaran umum Kabupaten Luwu yang berisi tentang keadaan geografis dan luas wilayah, penduduk dan ketenagakerjaan, pertumbuhan ekonomi, PDRB Perkapita, Tinjauan PDRB Propinsi Sulawesi Selatan.

7. Lapangan Usaha

Yang dimaksud Lapangan Usaha adalah kegiatan ekonomi yang biasa juga disebut sektor sebagaimana tertuang dalam PDRB.

3.5.Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, masalah pokok, tujuan dan kegunaan.

BAB II : Tinjauan Pustaka, membahas tentang Pembangunan Ekonomi, Teori Pertumbuhan Ekonomi, Komponen Sektor dalam Struktur Ekonomi, Teori Basis Ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dan Hipotesis.

BAB III : Metodologi Penelitian , menguraikan tentang Kerangka Konseptual, jenis dan sumber data, metode analisis, dan definisi operasional serta sistematika penulisan.

BAB IV : Gambaran umum, mengenai gambaran umum Kabupaten Luwu yang berisi tentang keadaan geografis dan luas wilayah, penduduk dan ketenagakerjaan, pertumbuhan ekonomi, PDRB Perkapita, Tinjauan PDRB Propinsi Sulawesi Selatan.

BAB V : Hasil dan Pembahasan, berisi tentang analisis struktur ekonomi, sektor-sektor ekonomi yang potensial, pengeluaran sektor basis dalam APBD.

BAB VI : Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

Letak wilayah Kabupaten Luwu berada pada $2^{\circ}.34'.45'' - 3^{\circ}.30,30''$ Lintang Selatan dan $120^{\circ}.21.15'' - 121^{\circ}.43,11'$ Bujur Timur dari Kutub Utara dengan patokan posisi Propinsi Sulawesi Selatan, dengan demikian posisi Kabupaten Luwu berada pada bagian utara dan timur Propinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Luwu berjarak sekitar kurang lebih 400 km dari Kota Makassar dan terletak di sebelah utara dan timur Provinsi Sulawesi Selatan.

Dari letak geografis di atas dapat menentukan batas-batas wilayah Kabupaten Luwu sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Kabupaten Luwu Utara dan Kota Palopo

Sebelah Timur berbatasan dengan : Teluk Bone

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kota Palopo dan Kabupaten Wajo

Sebelah Barat berbatasan dengan : Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Enrekang.

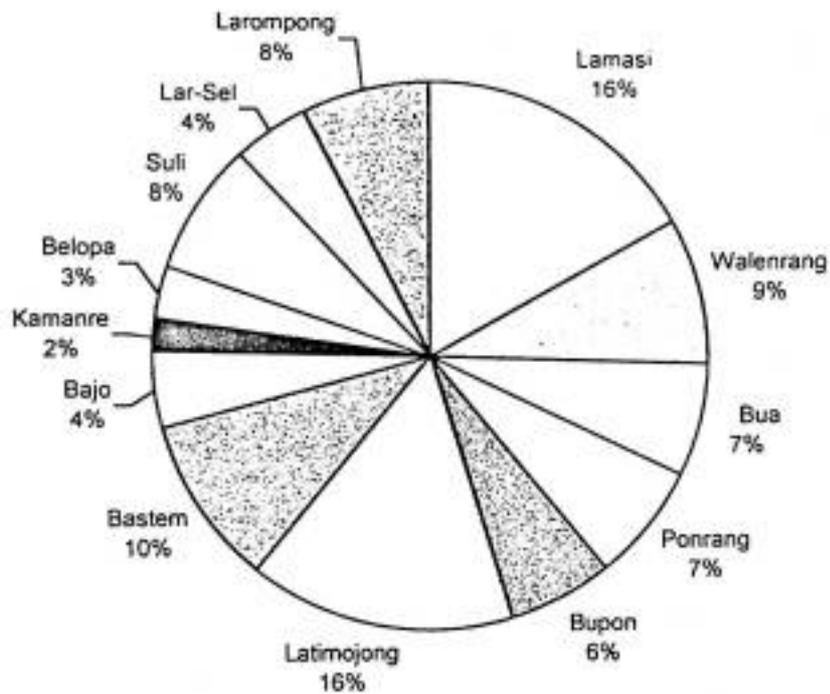
Pada tahun 1999, Kabupaten Luwu dimekarkan menjadi Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu itu sendiri. Dalam interval waktu tiga tahun pasca pemekaran Kabupaten Luwu yang memisahkan antara Palopo dan Luwu itu sendiri atas dasar UU No.11 Tahun 2002 dimana Kota Palopo menjadi wilayah otonomi sendiri dan Kabupaten Luwu dengan ibukotanya yang baru adalah Belopa

Luas wilayah administrasi Kabupaten Luwu kurang lebih 3000,25 km² terdiri dari 13 kecamatan yang dibagi habis menjadi 1925 desa/kelurahan. Kecamatan Lamasi adalah kecamatan terluas di Kabupaten Luwu, luas Kecamatan Lamasi tercatat sekitar 505,74 km² atau sekitar 16,86 % dari luas Kabupaten Luwu, menyusul kemudian Kecamatan Bassesangtempe dan Walenrang dengan luas masing-masing sekitar 301,00 km² dan 259,86 km² atau 10,03 % dan 8,64 %. Sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Kamanre dengan luas kurang lebih 52,44 km² atau hanya sekitar 1,75 %.

Menurut ketinggian daerah sebagian besar wilayah Kabupaten Luwu berada diketinggian di atas 100 m. Di Kabupaten Luwu tercatat 8 sungai yang cukup besar dan panjang kedelapan sungai tersebut masing-masing adalah Sungai Lamasi yang melintasi Kecamatan Lamasi

dan Kecamatan Walenrang, Sungai Pareman yang melintasi Kecamatan Bupon dan Ponrang, Sungai Bajo melintasi Kecamatan Bajo dan Belopa, Sungai Suli melintasi Kecamatan Suli, Sungai Larompong melintasi Kecamatan Larompong, Sungai Temboe melintasi Kecamatan Larompong, Sungai Riwang melintasi Kecamatan Larompong dan Sungai Siwa melintasi Kecamatan Larompong Selatan. Dari kedelapan sungai tersebut yang terpanjang adalah Sungai Pareman dengan panjang tercatat sekitar 73 km. Tujuh sungai lainnya panjangnya tercatat sekitar 16-69 km.

Gambar 1
Persentase Luas Daerah Administrasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu



Sumber : BPS Kabupaten Luwu

4.1. Penduduk dan Ketenagakerjaan

Jumlah penduduk Kabupaten Luwu pada tahun 1999 atau sebelum pemekaran adalah 768.964 jiwa, sedang pada tahun 2000 setelah terbentuknya Kabupaten Luwu Utara jumlah penduduk tersebut menjadi 397.531 jiwa selanjutnya dengan peningkatan status Kota Administratif Palopo menjadi Kota Otonom Palopo maka jumlah penduduk Kabupaten Luwu adalah 315.720 jiwa. Kini berarti bahwa

terjadi pengurangan jumlah penduduk dalam kurun waktu 1999 – 2003 sebagai akibat dari pembentukan kabupaten Luwu Utara dan peningkatan status Kota Administrative Palopo menjadi kota otonom.

Namun pada wilayah kecamatan yang tetap menjadi bagian administrative Kabupaten Luwu jumlah penduduk tersebut mengalami peningkatan pada periode 1999 – 2003, pada tahun 1999 jumlah penduduk pada wilayah dimaksud adalah 286.251 jiwa kemudian pada tahun 2003 menjadi 315.720 jiwa yang berarti terdapat peningkatan sebesar 29.469 jiwa atau meningkat 10,29 % dengan pertumbuhan rata-rata 2,06 % per tahun.

Menurut hasil registrasi penduduk yang diolah berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2000, penduduk usia kerja di daerah Kabupaten Luwu tahun 2003 berjumlah 225.594 jiwa yang terdiri dari 114.952 jiwa laki-laki dan 110.642 jiwa perempuan, atau dengan kata lain dari 301.448 penduduk ada sekitar tiga perempat bagian yang tergolong penduduk usia kerja.

Untuk tahun 2003 di Kabupaten Luwu penduduk usia kerja yang tergolong kategori angkatan kerja sekitar 69,74 persen dan sisanya sekitar 30,26 persen adalah penduduk yang dikategorikan sebagai penduduk bukan angkatan kerja.

Tabel 1.1 Penduduk Usia 10 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Lapangan Kerja Utama di Kabupaten Luwu

TAHUN	Lapangan Pekerjaan Utama										
	Pertanian	Pertamban gan	Industri	Listrik, gas dan air	Bangunan	Prdngn,htl & restoran	Transp. & Kmnks	Keu, Prsewaan & Js.Prshn	Jasa	Lainnya	Jumlah
2000	102.289	-	2.353	-	-	5.758	1.521	-	6.846	118	136.372*
2001	115.758	-	5.340	240	2.844	13.695	5.388	-	11.853	-	155.118
2002	110.549	347	5.864	238	2.330	17.139	8.344	823	12.369	-	158.003
2003	98.670	584	9.658	436	3.743	24.734	7.224	132	14.811	264	160.256
2004	94.041	760	4.683	-	2.156	13.354	5.866	153	3.813	1.444	126.270

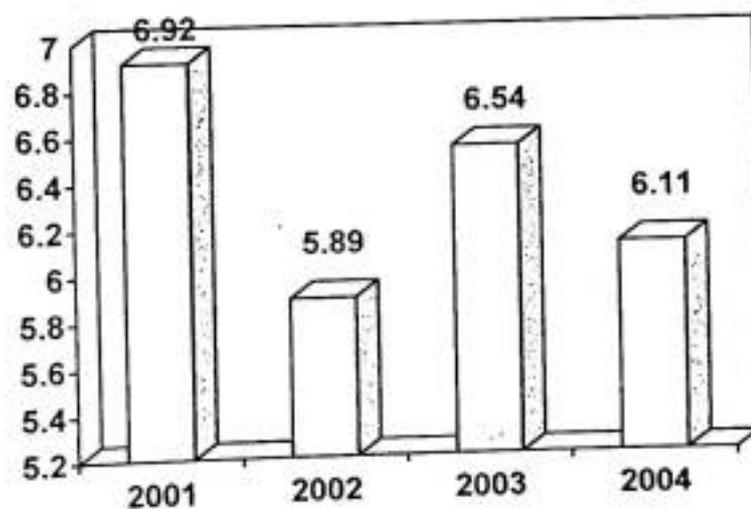
*17.487 Tidak Terjawab

Sumber : BPS Prop. Sul-Sel

4.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu pada kurun waktu 2001-2004 yang terlihat pada tabel menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang sedikit berfluktuasi. Pertumbuhan ekonomi 6,11 % pada tahun 2004 dapat dikatakan sedikit melambat dibanding dengan pertumbuhan ekonpmi pada tahun sebelumnya. Kondisi ini dapat terjadi akibat dari terjadinya penurunan produksi pada sektor pertanian terutama dari sub sektor Tabama dan Perikanan yang didalam PDRB memiliki kontribusi terbesar dari 9 sektor atau sekitar 61,04 %.

Tabel 1.2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Tahun 2001 – 2004 (Persen)

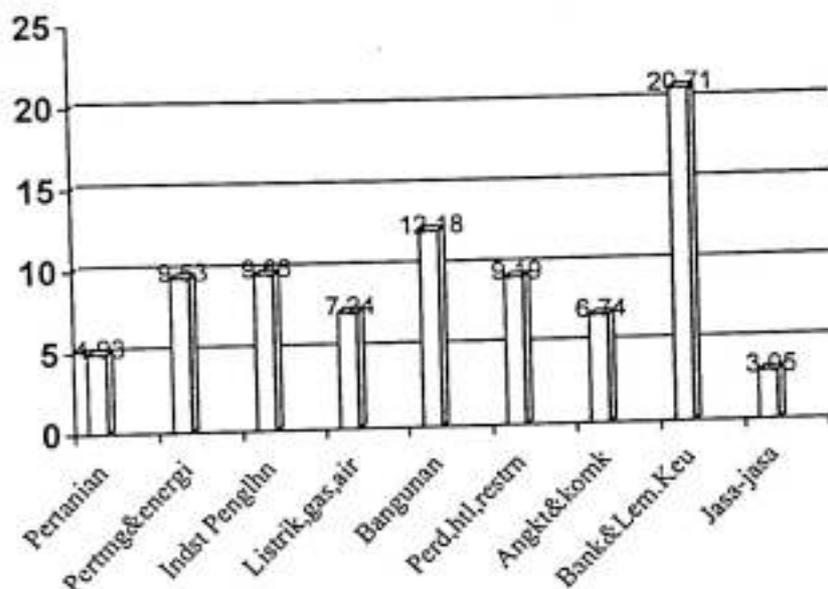


Sumber : BPS Kabupaten Luwu

4.3.Pertumbuhan Riil Setiap Sektor

Pertumbuhan riil setiap sektor kegiatan ekonomi pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.3.Pertumbuhan Per Sektor Ekonomi Kab.Luwu Tahun 2004



Sumber : BPS Kabupaten Luwu

Dari tabel di atas tercatat bahwa sektor ekonomi yang paling tinggi laju pertumbuhan pada tahun 2004 adalah Sektor Bank dan Lembaga Keuangan dengan angka pertumbuhan sebesar 20,71 persen dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan 21.686,49 juta rupiah, selanjutnya sektor bangunan dengan laju pertumbuhan pada tahun 2004

sebesar 12,18 persen dengan nilai PDRB sebesar 62.781,93 juta rupiah.

Sektor selanjutnya yang berada pada peringkat ketiga adalah Sektor Industri Pengolahan yang pertumbuhannya mencapai 9,66 persen dengan nilai PDRB sebesar 118.863,17 juta rupiah, kemudian peringkat selanjutnya adalah Sektor Pertambangan dan Penggalian, Restoran dan Hotel dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 9,53 dan 9,19 persen dengan nilai PDRB atas dasar harga Konstan 12.887,86 juta dan 65.325,96 juta rupiah.

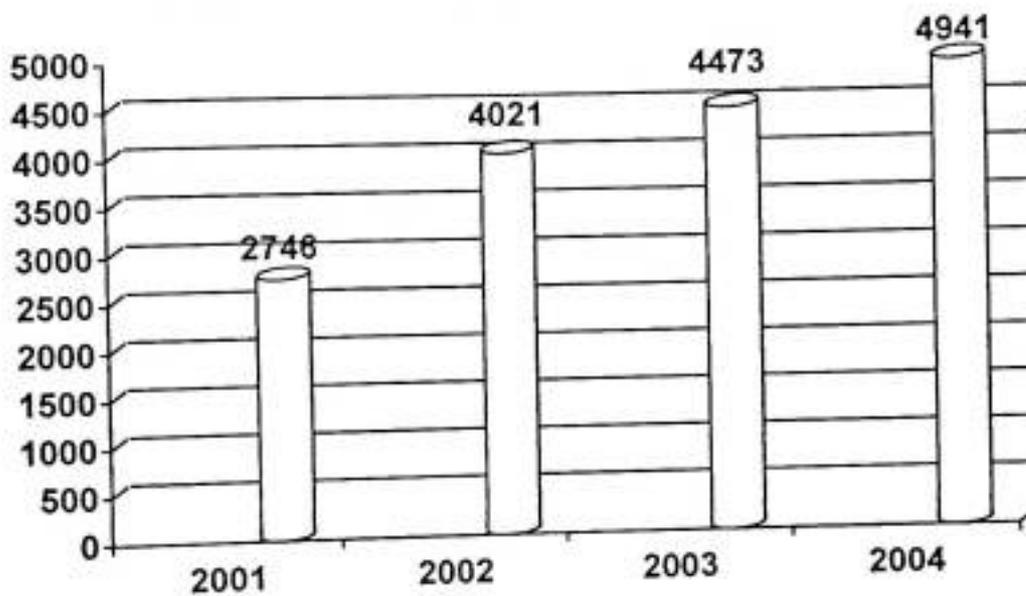
Peringkat berikutnya adalah sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, dimana laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2004 sebesar 7,24 persen dengan nilai PDRBnya sebesar 2.322,36 juta rupiah. Sedangkan Sektor Angkutan dan Komunikasi, Pertanian dan Jasa-jasa masing-masing memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 6,74 , 4,93 dan 3,05 persen.

4.4.PDRB Perkapita

Dengan berkembangnya perekonomian Kabupaten Luwu dan melambatnya penambahan jumlah penduduk akan berdampak pada peningkatan PDRB perkapita. Namun demikian angka tersebut tidak

menggambarkan penerimaan penduduk secara nyata, karena angka itu hanya merupakan rata-rata.

Tabel 1.4. PDRB Perkapita Penduduk Kabupaten Luwu
tahun 2001-2004 (Ribuan Rupiah)

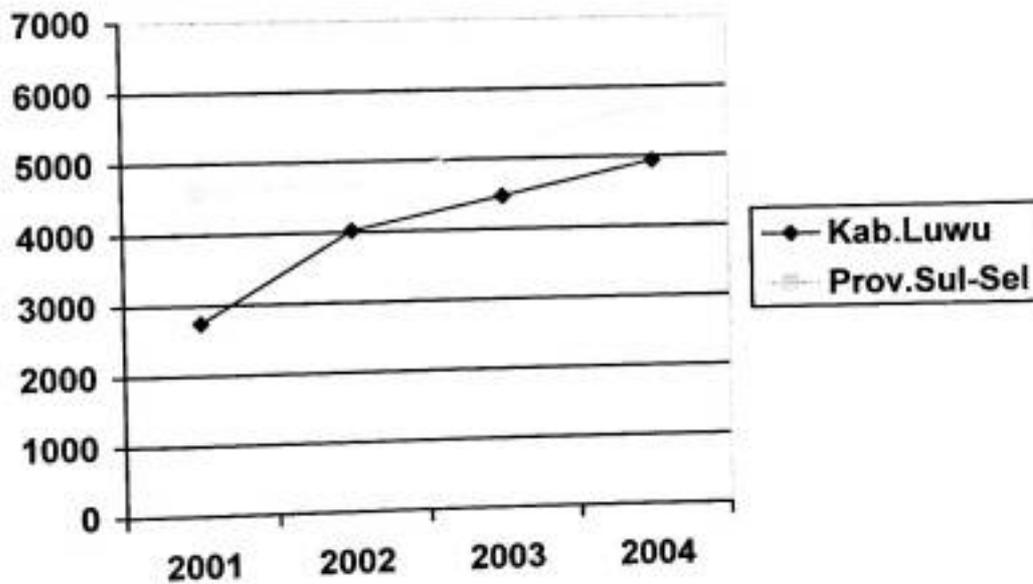


Sumber : BPS Kabupaten Luwu

Pada tahun 2003 PDRB perkapita Penduduk Kabupaten Luwu sebesar Rp.4.472.995 meningkat menjadi Rp.4.941.080 pada tahun 2004 atau naik rata-rata tiap tahun 10,84 persen.

Dibandingkan dengan PDRB Perkapita Penduduk Sulawesi Selatan, PDRB Perkapita Penduduk Kabupaten Luwu relatif lebih rendah. PDRB Perkapita Penduduk Sulawesi Selatan secara keseluruhan tercatat sekitar Rp.5.776.921 pada tahun 2004.

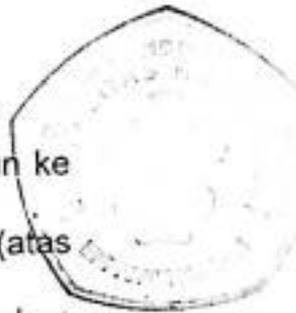
Grafik 1. Rata-rata PDRB Perkapita Penduduk Kabupaten Luwu dan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001-2004



Sumber : BPS Kabupaten Luwu

4.5. Tinjauan PDRB Sulawesi Selatan

Perkembangan ekonomi Propinsi Sulawesi Selatan dari tahun ke tahun terus membaik. Hal ini ditunjukkan dengan angka PDRB (atas dasar harga berlaku) yang selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2004 misalnya, nilainya telah mencapai sekitar 48.509,53 milyar rupiah atau terjadi peningkatan sekitar 13,19 % bila dibandingkan dengan keadaan tahun sebelumnya. Dari PDRB ini terlihat struktur ekonomi Sulawesi Selatan pada kurun waktu 2000-2004.



Tabel 2.1. Produk Domestic Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Propinsi Sulawesi Selatan atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2000 – 2004 (juta rupiah)

Lapangan Usaha	2000	2001	2002	2003	2004
1	2	3	4	5	6
1. Pertanian	11.661.151,62	12.771.670,83	14.472.458,59	15.415.225,19	16.268.572,73
2. Pertambangan dan penggalian	2.837.102,22	2.699.344,67	2.394.449,20	3.018.779,67	3.981.288,23
3. Industri Pengolahan	3.990.794,37	4.624.519,37	5.088.357,89	5.745.283,50	6.527.538,32
4. Listrik, gas dan air	265.582,12	327.237,44	422.147,25	472.555,63	494.204,51
5. Bangunan	1.233.904,46	1.501.165,92	1.688.955,73	1.894.986,24	2.251.111,79
6. Perd, hotel dan restoran	4.206.616,80	5.0321.843,19	5.700.550,50	6.403.926,11	7.260.339,35
7. Angkutan dan komunikasi	1.834.276,39	2.186.460,92	2.431.878,54	2.857.268,60	3.357.431,68
8. Bank dan lembaga keuangan	1.213.347,90	1.423.439,27	1.657.087,72	2.109.272,21	2.907.727,70
9. Jasa-jasa	3.520.556,81	4.204.301,18	4.666.788,72	4.938.572,95	5.461.290,57
PDRB	30.763.332,69	34.770.982,79	38.522.673,84	42.855.870,10	48.509.525,33

Sumber : BPS Propinsi Sulawesi Selatan

Tabel 2.2. Produk Domestic Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Propinsi Sulawesi Selatan atas Dasar Harga Konstan 2000, Tahun 2000 – 2004 (juta rupiah)

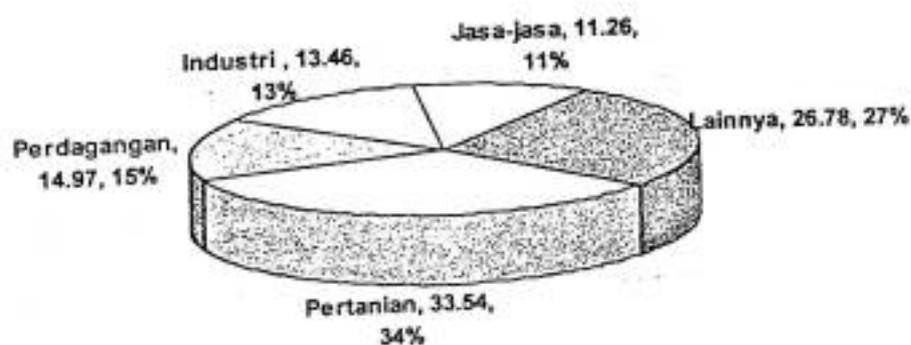
Lapangan Usaha	2000	2001	2002	2003	2004
1	2	3	4	5	6
1. Pertanian	11.661.151,62	11.785.184,15	12.328.037,73	12.432.541,10	12.313.064,99
2. Pertambangan dan penggalan	2.837.102,22	3.002.793,57	2.886.813,57	3.205.949,52	3.498.308,03
3. Industri Pengolahan	3.990.794,37	4.219.282,84	4.344.977,00	4.688.360,69	4.980.594,69
4. Listrik, gas dan air	265.582,12	297.694,63	316.286,79	333.414,87	330.143,41
5. Bangunan	1.233.904,46	1.347.462,92	1.432.888,24	1.519.455,43	1.684.331,16
6. Perd, hotel dan restoran	4.206.616,80	4.556.761,42	4.775.926,15	5.094.173,42	5.420.041,49
7. Angkutan dan komunikasi	1.834.276,39	2.020.431,80	2.138.275,22	2.365.974,54	2.634.374,23
8. Bank dan lembaga keuangan	1.213.347,90	1.298.562,57	1.408.487,38	1.705.132,27	2.198.255,38
9. Jasa-jasa	3.520.556,81	3.806.731,51	4.027.433,19	4.081.048,29	4.207.855,34
PDRB	30.763.332,69	32.334.905,41	33.659.125,27	35.426.050,13	37.266.968,72

Sumber : BPS Propinsi Sulawesi Selatan

Peranan sektor pertanian terhadap perekonomian Sulawesi Selatan masih cukup besar yakni rata-rata 36,34 %. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Sulawesi Selatan perekonomiannya masih mengandalkan pada pertanian.

Selain pertanian sektor lain yang mempunyai kontribusi cukup besar adalah sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, dan sektor jasa-jasa yang masing-masing menyumbang 13,46 %; 14,97 %; dan 11,26 % (tahun 2004) terhadap pembentukan total PDRB Sulawesi Selatan. Sedangkan sektor listrik, gas, dan air bersih pada tahun yang sama mempunyai kontribusi yang paling kecil, yakni hanya sekitar 1,02 %.

Gambar 2. Struktur Ekonomi Sulawesi Selatan Tahun 2004



Sumber : BPS Propinsi Sulawesi Selatan

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini akan membahas struktur perekonomian Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2001 hingga 2004 . Selanjutnya akan mengidentifikasih sektor – sektor yang menjadi unggulan dengan mengetahui pertumbuhan dan struktur ekonomi. Untuk mengidentifikasinya diperlukan suatu metode analisis yang dapat membedakan sektor basis dan non basis. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis Location Quotient (LQ). Untuk selanjutnya dengan teridentifikasinya sektor unggulan ini akan dapat dikembangkan dengan pengalokasian anggaran untuk pembiayaan pada sektor unggulan ini melalui dinas-dinas ataupun badan pada pemerintahan daerah.

5.1. STRUKTUR EKONOMI

Struktur ekonomi Kabupaten Luwu dalam kurun waktu 2000-2004 masih didominasi oleh sektor pertanian. Pada tahun 2000 kontribusi sektor pertanian terhadap total PDRB atas dasar harga berlaku adalah 51,90 %. Selain sektor pertanian , sektor lain yang kontribusinya berada pada urutan kedua adalah industri pengolahan. Pada tahun 2001 sektor

ini memberi kontribusi sebesar 14,69 % terhadap total PDRB. Berikutnya adalah sektor jasa, dimana pada tahun 2000 sektor ini memberi kontribusi sebesar 14,01 % terhadap total PDRB.

Pada tahun 2004 kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan nilai total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Luwu sekitar 61,04 % atau lebih dari separuh nilai total PDRB Kabupaten Luwu berasal dari pertanian. Sektor-sektor lain yang cukup besar peranannya terhadap perekonomian di Kabupaten Luwu pada tahun 2004 masing-masing adalah sektor jasa-jasa sebesar 10,99 %. Sektor industri pengolahan 10,54 % dan sektor bangunan sebesar 6,55 %.

Tabel 3.1. Produk Domestic Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Luwu atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2000 – 2004 (juta rupiah)

Lapangan Usaha	2000	2001	2002	2003	2004
1	2	3	4	5	6
1. Pertanian	614.916,00	468.398,88	778.725,44	849.364,18	933.722,92
2. Pertambangan dan penggalian	10.002,00	10.117,08	12.396,63	14.656,81	16.640,67
3. Industri Pengolahan	81.413,00	81.550,05	104.625,87	138.673,17	161.180,40
4. Listrik, gas dan air	1.733,00	1.710,11	2.259,07	1.983,62	2.989,14
5. Bangunan	35.143,00	26.482,60	41.387,83	78.600,91	100.193,86
6. Perd, hotel dan restoran	45.443,00	52.222,38	66.866,39	80.784,85	82.663,10
7. Angkutan dan komunikasi	14.070,00	11.359,76	19.056,27	22.231,70	25.438,241
8. Bank dan lembaga keuangan	15.051,00	18.687,17	19.544,44	22.136,19	28.721,84
9. Jasa-jasa	107.716,00	53.645,61	143.010,70	150.803,49	168.148,50
PDRB	817.770,00	724.173,63	1.187.872,64	1.359.884,36	1.529.699,02

Sumber : BPS Kabupaten Luwu

Tabel 3.2 Produk Domestic Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Luwu atas Dasar Harga Konstan 1993* / 2000 Tahun 2000 – 2004 (juta rupiah)

Lapangan Usaha	2000*	2001*	2002	2003	2004
1	2	3	4	5	6
1. Pertanian	125.676,37	131.285,99	688.866,92	708.250,41	743.143,17
2. Pertambangan dan penggalan	4.372,80	4.564,15	10.820,82	11.766,25	12.887,86
3. Industri Pengolahan	35.568,57	37.076,57	89.997,75	108.394,58	118.863,17
4. Listrik, gas dan air	800,50	855,86	2.010,25	2.165,48	2.322,36
5. Bangunan	7.832,01	8.228,22	34.861,55	55.966,38	62.781,93
6. Perd, hotel dan restoran	18.428,64	19.635,11	55.399,03	59.828,02	65.325,96
7. Angkutan dan komunikasi	6.059,43	6.290,16	15.740,21	16.860,50	17.996,85
8. Bank dan lembaga keuangan	9.484,21	10.231,03	16.921,16	17.965,44	21.686,49
9. Jasa-jasa	33.921	35.338,58	123.519,85	124.808,41	128.617,02
PDRB	242.144,41	253.505,67	1.038.137,54	1.106.005,47	1.173.625,52

Sumber : BPS Kabupaten Luwu

5.2. ANALISA SEKTOR-SEKTOR EKONOMI UNGGULAN

Untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi unggulan atau sektor basis maka digunakan alat analisis yakni :

Analisis Location Quotient (LQ)

Untuk mengetahui posisi dari masing-masing sektor apakah termasuk dalam kategori basis atau bukan basis, digunakan Location Quotient (LQ) dengan cara membandingkan setiap sektor perekonomian Kabupaten Luwu dengan peranan kegiatan sektor perekonomian Propinsi Sulawesi Selatan, sehingga dapat maka dapat dijelaskan dalam metode analisis LQ sebagaimana pembahasan berikut :

Dari hasil analisis menunjukkan bahwa selama periode pengamatan yakni dari tahun 2000 hingga tahun 2004, menunjukkan bahwa sektor pertanian dapat dikategorikan sebagai sektor basis di Kabupaten Luwu. Dimana di awal hingga akhir periode tahun pengamatan sektor tersebut berkoefisien $LQ > 1$. Sedangkan sektor bangunan hanya diakhir-akhir periode pengamatan yakni tahun 2003-2004 berkoefisien $LQ > 1$.

Angka Location Quotient (LQ) per Sektor Ekonomi Kabupaten Luwu Periode
Tahun 2000 – 2004

Sektor	2000	2001	2002	2003	2004
1		2	3	4	5
1. Pertanian	1,981	1.763	1.723	1.739	1.822
2. Pertambangan dan penggalan	0,132	0.179	0.226	0.154	0.133
3. Industri Pengolahan	0,771	0.133	0.841	0.761	0.786
4. Listrik, gas dan air	0,264	0.251	0.212	0.126	0.195
5. Bangunan	1,074	0.851	0.864	1.313	1.424
6. Perd, hotel dan restoran	0,405	0.497	0.507	0.399	0.406
7. Angkutan dan komunikasi	0,291	0.254	0.254	0.244	0.241
8. Bank dan lembaga keuangan	0,472	0.634	0.605	0.332	0.318
9. Jasa-jasa	1,155	0.611	0.570	0.966	0.976

Sumber : BPS Kab.Luwu , PDRB Kab.Luwu (Data diolah kembali)

Berdasar kepada kriteria analisis Location Quotient, bahwa sektor yang berkoefisien $LQ > 1$ disebut sebagai sektor potensial / unggulan, maka sektor pertanian yang berkoefisien $LQ > 1$, seharusnya mendapat prioritas pengembangan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu, karena sektor ini beserta sub-sub sektornya berpotensi untuk dikembangkan guna memacu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu. Kemampuan sektor potensial dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Luwu maupun pada PDRB Propinsi Sulawesi Selatan. Sebaliknya, sektor yang memiliki koefisien $LQ < 1$, dapat dikatakan sebagai sektor tidak potensial atau sektor non basis, sektor-sektor tersebut belum berpotensi dalam peningkatan PDRB Propinsi Sulawesi Selatan karena bersifat local atau hanya mampu menyumbang bagi PDRB Kabupaten Luwu.

5.3 Pengeluaran Sektor Basis Dalam APBD

APBD selain sebagai alat perencana daerah juga berfungsi sebagai stimulan pembangunan. Dengan demikian, sektor-sektor yang potensial atau strategis akan mendapat prioritas utama dalam penyusunan anggaran dan seharusnya sumber penerimaan terbesar untuk daerah disumbangkan oleh sektor basis. Sebab, dengan berkembangnya sektor basis, akan mampu dipungut berbagai jenis pajak dan retribusi daerah. Di samping itu pula sektor

basis mampu membuka peluang-peluang usaha lainnya sehingga mampu meningkatkan penerimaan daerah lainnya.

Tabel Urutan Besarnya Proporsi Pengeluaran Pemerintah (Menurut Alokasi APBD Kab.Luwu Tahun 2004)

Dinas / Intansi	Peringkat	Keterangan
Pertanian & Peternakan, Perikanan & Kelautan, Kehutanan & Perkebunan	III	Sektor Basis
Pertambangan & Energi	VI	
Perindustrian dan Perdagangan	V	
Pendidikan dan Budaya	I	
Pekerjaan Umum	II	
Kesehatan	IV	

Sumber : BAPPEDA Kab.Luwu , APBD Kab.Luwu T.A. 2004 (Data Diolah Kembali).

Dari data diatas terlihat bahwa pengeluaran pemerintah paling banyak pada sektor yang bukan basis. Pengeluaran terbesar pada sektor pendidikan melalui Dinas Pemuda dan Olah Raga, disini terlihat adanya kecenderungan pemerintah pada pembenahan sumber daya manusia. Selanjutnya, di dinas Pekerjaan Umum (PU) sebagai instansi yang menduduki posisi kedua sebagai penerima alokasi APBD setelah Dinas Pemuda dan Olah Raga. Dinas ini banyak bergerak pada pembangunan sarana dan prasaran fisik jadi dapat digolongkan sebagai bagian dari Sektor Bangunan/Konstruksi. Pembangunan fisik ini memang sangat penting karena memiliki *multiplier effect*, namun sektor ini juga paling banyak mendapat sorotan dari masyarakat karena sektor ini rentan dengan unsur KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Sektor pertanian mendapat prioritas yang cukup dengan menduduki peringkat ketiga menurut alokasi pengeluaran pemerintah.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

1. Struktur Ekonomi Kabupaten Luwu dari tahun 2000 hingga periode tahun 2004, sektor pertanian masih sangat mendominasi jika dibandingkan dengan sektor lainnya.
2. Berdasarkan hasil dari analisis Location Quotient (LQ) untuk periode pengamatan 2000–2004, diperoleh sektor pertanian sebagai sektor potensial atau sektor basis Kabupaten Luwu.
3. Jika dilihat dari pengalokasian APBD Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2004 terhadap sektor pertanian melalui Dinas Pertanian dan Peternakan, Perikanan dan Kelautan, serta Kehutanan dan Perkebunan. Sektor basis di Kabupaten Luwu belum memperoleh porsi anggaran yang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Jadi hipotesis yang dikemukakan sebelumnya tidak terbukti.

6.2.Saran-saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, diajukan saran yang sekiranya dapat dipertimbangkan dan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu dalam memajukan perekonomian dan sukses dalam melaksanakan otonomi daerah, yakni :

1. Pemerintah daerah berkewajiban menciptakan lingkungan yang kondusif, memberikan peluang untuk mengembangkan usaha di sektor basis ini terutama usaha yang berskala kecil dan menengah, serta perlindungan yang sewajarnya, kemudahan-kemudahan aturan, mencari peluang pasar, diversifikasi produk, kredit-kredit bersyarat lunak. Konsekuensi dari kebijakan ini adalah alokasi anggaran pembangunan untuk pengembangan sektor basis harus lebih besar.
2. Khusus mengenai sektor pertanian beserta sub-sub sektor di dalamnya perlu mendapat perhatian pemerintah, mengingat fluktuasi produksi dan pemasarannya sector ini sangat tinggi. Ketergantungan yang besar pada faktor alam, seperti gagal panen, busuk , hama, panen yang berlimpah harus mendapat prioritas dari pemerintah untuk mengantisipasi segala kemungkinan.

6.2.Saran-saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, diajukan saran yang sekiranya dapat dipertimbangkan dan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu dalam memajukan perekonomian dan sukses dalam melaksanakan otonomi daerah, yakni :

1. Pemerintah daerah berkewajiban menciptakan lingkungan yang kondusif, memberikan peluang untuk mengembangkan usaha di sektor basis ini terutama usaha yang berskala kecil dan menengah, serta perlindungan yang sewajarnya, kemudahan-kemudahan aturan, mencari peluang pasar, diversifikasi produk, kredit-kredit bersyarat lunak. Konsekuensi dari kebijakan ini adalah alokasi anggaran pembangunan untuk pengembangan sektor basis harus lebih besar.
2. Khusus mengenai sektor pertanian beserta sub-sub sektor di dalamnya perlu mendapat perhatian pemerintah, mengingat fluktuasi produksi dan pemasarannya sector ini sangat tinggi. Ketergantungan yang besar pada faktor alam, seperti gagal panen, busuk , hama, panen yang berlimpah harus mendapat prioritas dari pemerintah untuk mengantisipasi segala kemungkinan.

3. Selain adanya sektor pertanian yang menjadi sektor basis , hendaknya pemerintah perlu mengupayakan kebijakan-kebijakan khusus untuk tidak hanya terfokus pada pengembangan sektor basis saja. Sehingga selain sektor basis akhirnya dapat memberikan kontribusi yang lebih besar lagi bagi pembangunan ekonomi Kabupaten Luwu , sektor non basis juga diberi perhatian khusus misalnya dengan pengadaan sarana dan prasarana yang dapat menunjang produktivitas sektor non basis, sehingga pada akhirnya akan menjadi sektor basis pula yang dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan ekonomi di Kabupaten Luwu.
4. Tidak hanya dari pihak pemerintah , akan tetapi kerjasama dari pihak swasta , masyarakat dan seluruh pihak dibutuhkan bagi kesuksesan pembangunan di berbagai sektor di Kabupaten Luwu.

Daftar Pustaka

Arsyad , Lincolin.1999. *Ekonomi Pembangunan*, Edisi ke-4,cetakan ke-1
Yogyakarta : STIE. YPKN

Azis, Iwan Jaya.1994.*Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta : Lembaga Penerbit FE-UI

Bappeda.2005.*Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2005*. Bappeda Kabupaten Luwu.

Bappeda.2004.*Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2004 Kabupaten Luwu*.Bappeda Kabupaten Luwu.

Bappeda.2004.*Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Luwu Tahun 2004-2009*.Bappeda Kabupaten Luwu.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu.2004.*Kabupaten Luwu Dalam Angka 2004*. BPS Kabupaten Luwu.

Badan Pusat Statistik Sul-Sel.2004.*Propinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka 2004*. BPS Propinsi Sul-Sel.

Boediono.1984,*Teori Pertumbuhan Ekonomi*.Yogyakarta :FE – UGM.

Jhingan,M.L.2004.*Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, Edisi Ke IV*.
Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada

Kadaria.1985.*Ekonomi Perencanaan*.Jakarta : Lembaga Penerbit FE-UI

Kunarjo. 1996. *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan*. Jakarta :
Penerbit UI

Marselina, SE, MPM.1999. *Analisis Pengeluaran Pemerintah (Studi Kasus Lampung)*.

Partadireja, Ace. 1996. *Perhitungan Pendapatan Nasional*. Jakarta : LP3ES

Rapanna, Patta. *Analisis Pergeseran Struktur Ekonomi dan Identifikasi Sektor Unggulan di Kabupaten Bantaeng (Tahun 1994 dan 2002)*. Tesis, Program Pasca Sarjana UNHAS. 2004

Richardson, Harry W. 1991. *Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional* (Terjemahan Paul Sitohang). Jakarta : Lembaga Penerbit FE-UI

sulsei.go.id. Diakses tanggal 31 Agustus 2006.

Tarigan, Robinson, Drs, M.R.P. 2005. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Usman, Marzuki. *Dampak Positif Pemekaran Wilayah*. Website Harian Umum Sinar Harapan. Diakses tanggal 31 Agustus 2006.

Widodo, T.Suseno, HG. *Indikator Ekonomi : Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*. Penerbit Kanisius. Yogyakarta : 1990